

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, lembaga perwakilan di Indonesia telah mengalami berbagai pergulatan konsep. Berbagai penyempurnaan dan perubahan sesuai dengan konteks zaman, kondisi politik, dan tentunya didasarkan konstitusi pun telah dilakukan. Saat era kolonialisme Belanda ada model perwakilan dengan nama *Volksraad* (Dewan Rakyat)¹ yang sarat kepentingan kolonial dan upaya penampilan politik etis terhadap pribumi. Kemudian pada masa kolonial Jepang, pemerintah bala tentara Jepang di Indonesia membentuk sebuah badan perwakilan bernama *Tjuo Sangi-in*² dengan dibentuk juga *Shu Sangikai* (Dewan Penasihat Daerah) di tingkat karisidenan dan *Tokubetsushi Sangikai* khusus di Jakarta. Singkat kata, badan perwakilan pada masa kolonial ini secara keseluruhan jauh dari praktek suatu dewan perwakilan rakyat.³

Dalam hal perkembangan perwakilan daerah di parlemen, gagasan mengenai utusan daerah berasal dari Mohammad Yamin yang disampaikan saat

¹ Dalam periode *Volksraad* (1918-1942) tidak secara nyata menunjukkan perwakilan rakyat yang fungsional, karena *Volksraad* berada dibawah kuasa pemerintah kolonial Belanda. Lihat Efriza dan Syafuan Rozi, 2010, *Parleman Indonesia Geliat Wolkstraad hingga DPD: Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Nanti*, Bandung, Alfabeta, hal. 2.

² *Tjuo Sangi-in* merupakan sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan *Saiko Sikikan* (Penguasa Militer Tertinggi) mengenai hal-hal yang menyangkut usaha memenagkan perang Asia Pasifik. Lihat *Ibid.*

³ *Ibid.*

menyampaikan pandangan mengenai konsep UUD 1945.⁴ Kemudian dalam konstitusi pertama Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)⁵ mengatur dengan konsep “utusan daerah”. Dalam hal ini utusan daerah bersanding dengan utusan golongan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, pada masa awal kemerdekaan, hanya terbentuk lembaga perwakilan bernama Komite Nasional Pusat (KNP)⁶. Tetapi komite ini cenderung belum memenuhi kriteria representasi publik karena dibentuk dalam keadaan “darurat” pada masa awal kemerdekaan. Pada saat itu keadaan logistik kurang memungkinkan untuk melangsungkan Pemilu guna memilih wakil rakyat dalam lembaga legislatif.

Pada saat konstitusi berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (K-RIS) 1949, lembaga perwakilan menjadi 2 (dua) kamar atau yang dikenal dengan bikameral, yaitu terdiri atas Senat yang mewakili negara bagian dan berdampingan dengan DPR. Pada masa UUD Sementara (UUDS) 1950 lembaga perwakilan rakyatnya kembali dengan sistem unikameral yang dikenal

⁴ Dalam forum itu Mohammad Yamin menyampaikan konsep *The Six Power of The Republic Indonesia* yang terdiri dari Presiden dan wakil Presiden, MPR, DPR, Majelis Perimbangan, Balai Agung, Mahkamah Tinggi, serta Kementrian. Pada waktu itu ia menyampaikan bahwa anggota MPR disamping melalui pemilihan umum yang bebas, juga berasal dari wakil daerah dan wakil golongan. Lihat Sulardi, 1999, *Demokratisasi di Indonesia Menjelang Pemilu 1999 (Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Undang-Undang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilu 1999)*, Malang, Lembaga Penelitian Unuversitas Muhammadiyah Malang, hal. 37.

⁵ Lihat Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang*”.

⁶ KNP awalnya dibentuk untuk “membantu” presiden dalam menjalankan kekuasaannya, membawa berbagai perubahan besar dalam perpolitikan Indonesia. Selain berubahnya sistem pemerintahan, ternyata KNP kemudian berubah fungsi sebagai lembaga perwakilan sampai terbentuk MPR/DPR hasil Pemilu. Namun pada masa KNP selama 3 bulan itu, 18 Agustus 1945-27 Desember 1945 ini Pemilu yang diharapkan dapat terlaksana pada masa itu tidak pernah terwujud sampai akhirnya UUD 1945 digantikan oleh berlakunya K-RIS 1949. Lihat Efriza dan Syafuan Rozi, *Op.cit.*, hal. 16.

dengan DPR Sementara (DPRS) atau kemudian dengan DPR sebagai hasil Pemilu 1955. Dalam sistem perwakilan UUDS 1950, Senat yang mencerminkan perwakilan daerah ditiadakan karena bentuk negara tidak lagi federal.

Setelah K-RIS 1949 dan UUDS 1950, terbitnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menyatakan berlakunya Periode Kedua UUD 1945. Berlakunya kembali UUD 1945, Presiden kemudian membentuk MPR Sementara (MPRS) dan anggota-anggotanya sesuai dengan konsideran dalam Dekrit Presiden. MPRS kemudian dibentuk yang terdiri atas Anggota DPR Golongan Rakyat (DPRGR) ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Tetapi seluruh anggota MPRS baik DPRS, utusan golongan, maupun utusan daerah diangkat oleh Presiden sehingga kepentingan dan subjektivitas presiden sangat mempengaruhi putusannya mengangkat seseorang menjadi anggota MPRS dan menjadikan MPRS di bawah pengaruh presiden.

Kemudian pada pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto lembaga perwakilan tidak berbeda jauh dan hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Utusan daerah dan utusan golongan sebagai anggota MPR hanya bekerja sekali dalam lima tahun, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan GBHN. Pada saat itu utusan golongan dan utusan daerah banyak mengalami penyimpangan sehingga tidak lagi efektif, tidak demokratis, dan tidak mencerminkan secara representatif utusan golongan dan utusan daerah. Sehingga diusulkan utusan golongan untuk dihapus karena konsep golongan sangat kabur dan menimbulkan manipulasi serta kericuhan

politik.⁷

Terjadinya penyimpangan utusan daerah ditambah dengan kesalahan orde baru dalam manajemen hubungan pemerintah pusat dan daerah menimbulkan masalah pada masa pasca orde baru. Munculnya daerah-daerah yang mengalami kekecewaan terhadap pemerintah pusat mengakibatkan beberapa daerah melakukan gerakan separatis. Seiring dengan gerakan tersebut Indonesia dihadapkan berbagai konflik yang berkenaan dengan masa depan wilayah-wilayah yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia seperti Gerakan Aceh Merdeka (1976), Timor Timur hingga dilakukan Jajak pendapat (1999), dan juga di Papua sekelompok orang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) meskipun akhirnya mampu diatasi oleh ABRI.⁸

Runtuhnya orde baru pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi saat yang menentukan untuk mereformasi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk sistem ketatanegaraan yang mengalami berbagai perubahan sebagai konsekuensi atas adanya perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 tersebut sebagai salah satu tuntutan mendasar dari gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan kalangan reformis. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem

⁷ Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, hal. 154.

⁸ M. Yusuf, 2013, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 33.

ketatanegaraan.⁹

Perubahan UUD 1945 melalui empat tahap amandemen mulai tahun 1999-2002¹⁰ telah menghadirkan lembaga-lembaga negara baru. Salah satu lembaga baru tersebut adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara formal konstitusional, DPD mulai terbentuk sejak disahkan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 9 November 2001. Namun secara faktual, kelahiran DPD baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004 yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah janji para anggota DPD sebagai hasil pemilu 5 April 2004.¹¹ Berdasarkan perubahan UUD 1945 tersebut, gagasan pembentukan DPD diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menstimulasi secara positif kemajuan demokrasi di Indonesia, terutama keterwakilan di daerah dalam kebijakan yang berpihak pada warga negara, yang lebih banyak di daerah¹² sehingga mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik

⁹ Muchammad Ali Syafa'at, 2010, *Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*, Malang, UB Press, hal. 1.

¹⁰ Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1998 membahas pembatasan kekuasaan presiden dan penguatan kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000 membahas masalah wilayah Negara dan pembagian pemerintah daerah, penyempurnaan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan ketentuan terperinci Hak Asasi Manusia. Perubahan ketiga disahkan 10 November 2001 ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan Negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Perubahan ke empat disahkan 10 Agustus 2002 membahas ketentuan tentang kelembagaan Negara dan hubungan antar lembaga Negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan dan aturan tambahan. Lihat juga Luthfi Widagdo Eddyono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 3, hal 3.

¹¹ Robert Endi Jaweng, *et.al.*, 2006, *Mengenal DPD-RI: Sebuah Gambaran Awal (edisi revisi)*, Jakarta, Institute for Local Development, hal. 103.

¹² DPD RI, 2014, *Pengkajian Positioning Fungsi Pengawasan DPD RI dalam Musrenbang*, Jakarta, Sekretariat Jendral DPD RI, hal. 43.

Indonesia.

Konsep lembaga perwakilan di Indonesia, sejak terbentuknya DPD berubah menjadi bikameral, dimana lembaga legislatif bukan hanya DPR tetapi juga terdapat kamar lainnya yaitu DPD. *Raison d'être* dari keberadaan DPD untuk mengakomodasikan semangat *checks and balances*¹³ tidak hanya antara pusat dan daerah tapi juga di dalam parlemen itu sendiri. Dengan adanya dua majelis dalam satu lembaga, hal tersebut memberikan keuntungan karena dapat memberikan jaminan semua produk legislatif dan tindakan-tindakan pengawasan dapat dilakukan secara *double check*.

Keberadaan DPD sebagai salah satu komponen penting dalam lembaga legislatif menambah kekuatan bagi representasi politik rakyat dalam struktur kenegaraan. Berbeda dengan DPR sebagai komponen yang mempresentasikan partai politik dengan konstituennya yang terbatas sehingga dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat secara menyeluruh¹⁴ sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah.¹⁵ Sehingga kedepan, hadirnya DPD akan memiliki peluang besar bila sistem politik yang dijalankan secara baik, karena

¹³ Merujuk pada hubungan antara *House of Representatives* (DPR) dan *Senate* di *Congress* (Parlemen) Amerika Serikat yang meletakkan keduanya pada fungsi legislasi seimbang dan dapat saling melakukan *checks and balances*. Di Amerika pembuatan RUU dilakukan di *Congress* kemudian dimintakan persetujuan dari presiden. Tetapi presiden dapat memveto RUU yang telah di loloskan di *Congress*. Kondisi itu bertolak belakang dengan Indonesia karena presiden juga memegang fungsi legislasi. Jadi presiden tidak dapat memveto UU yang telah lolos di parlemen aturan semacam ini perlu mendapat fokus khusus dalam menanggapi serta menyikapi kepentingan parlemen jangan sampai DPD RI hanya sebatas dekorasi demokrasi lembaga perwakilan Indonesia saja. Lihat M. Yusuf, *Op.cit*, hal. 18.

¹⁴ DPD RI, *Op.cit*, hal. 49.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 152.

DPD memiliki kemampuan¹⁶ untuk membawa kepentingan daerah tanpa tendensi kepentingan kelompok tertentu.

Namun demikian, fenomena banyaknya anggota DPD yang berbondong-bondong masuk partai politik¹⁷, patut dipertanyakan legitimasi DPD dari sisi keterwakilan daerahnya. Sebab dengan bergabung dalam partai politik, anggota DPD yang semula diharapkan masyarakat memperjuangkan kepentingan daerah akan dibenturkan dengan kepentingan partai yang menaunginya. Hal ini tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan dalam lembaga legislatif di Indonesia dan resistensi terhadap independensi atau kenetralan DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat.

Di sisi lain, anggota DPD berpendapat bahwa bergabungnya anggota DPD dalam partai politik adalah upaya untuk menguatkan lembaga DPD. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPD RI sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang dalam sebuah wawancara di KompasTV mengatakan:¹⁸

“Keinginan teman-teman di DPD sekarang ini merubah sistem untuk memperjuangkan kepentingan DPD itu sendiri, yaitu dengan cara bergabung dengan sebuah partai dan dapat menyuarakan aspirasi DPD itu di dalam DPR, yang sebenarnya keseimbangan antara DPR dan

¹⁶ Saat ini, kerdilnya fungsi DPD dalam konstitusi dan dari berbagai UU turunannya. Diakui kehadiran DPD sebagai lembaga perwakilan belum mengarah kepada adanya tugas fungsi dan wewenang yang sama dengan DPR. UUD 1945 yang mengatur DPD dan undang-undang turunannya menempatkan kedudukan DPD sangat lemah karena fungsinya hanya memberi pertimbangan kepada DPR. Lihat Efriza dan Syafuan Rozi, *Op.cit*, hal. 329.

¹⁷ Dari 132 anggota DPD sebanyak 67 anggota DPD bergabung dengan partai politik yaitu: Partai Hanura 27 orang, Partai Golkar 13 orang, PKS 5 orang, Partai Demokrat 5 orang, PAN 3 orang, PDIP 4 orang, PPP 5 orang, Partai Nasdem 1 orang, PKB 2 orang dan Partai Gerindra 2 orang. Lihat *Di Balik Tren Anggota DPD Masuk Parpol: Perjuangkan Daerah Lewat Partai*, Jawa Pos , 30 Januari 2017, hal. 2.

¹⁸ KompasTV, *Program Kompas Malam: Politisi Jadi Anggota DPD? (Bag 2)*, <https://www.youtube.com/watch?v=Ao0xaBToc0k>, diakses tanggal 14 Juni 2017.

DPD”.

Bergabungnya anggota DPD dalam sebuah partai politik, secara legal formal keputusan beberapa anggota DPD tidak melanggar undang-undang apapun. Undang-Undang Pemilu tidak secara eksplisit menegaskan larangan ataupun membolehkan DPD bergabung dengan partai politik. Aturan anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik awalnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diubah lewat revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2008. MK memutuskan menolaknya dan menegaskan syarat non parpol tidak ada dalam norma konstitusi. MK mengartikan siapapun dapat menjadi anggota DPD selama mencalonkan diri sebagai perseorangan seperti tercantum dalam pasal 22E Ayat 4 UUD 1945.¹⁹

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah peristiwa tentang anggota DPD yang bergabung dalam sebuah partai politik, karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis tentang Independensi Dewan Perwakilan Daerah atas Keanggotaan dalam Partai Politik”.**

B. Rumusan Masalah

¹⁹ Bunyi pasal 22E ayat 4 UUD 1945 yaitu: *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”*. Lihat juga *Batasi Intervensi Parpol ke DPD*, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170313/281517930924271>, diakses tanggal 14 Juni 2017.

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dalam Partai Politik?
2. Bagaimana idealnya keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam partai politik sebagai upaya menjaga independensi DPD?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan fokus permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas keanggotaan dalam Partai Politik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana idealnya keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas keanggotaan dalam partai politik sebagai upaya menjaga independensi DPD.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji sekaligus sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah

satu sarana untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan terkait dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

3. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keanggotaan DPD di masa yang akan datang agar dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sebuah gambaran mengenai keanggotaan DPD sehingga dapat dijadikan pertimbangan obyektif dan wacana untuk perbaikan DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak akan terlepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek masalah yang akan dikaji dapat dilakukan secara tepat dan benar. Hal ini tentunya bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek yaitu jenis penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²¹

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²² Dalam hal ini peristiwa anggota DPD yang juga menjadi anggota ataupun pengurus dalam partai politik akan dicari rujukan pada sistem norma untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian. Menurut Peter Mahmud dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya istilah data, tetapi langsung mengatakan sebagai bahan

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hal.43

²¹ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hal. 57.

²² *Ibid*, hal. 36.

hukum.²³ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.²⁴ Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum ini terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.²⁵ Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya

²³ *Ibid*, hal. 42.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hal. 43.

menggunakan buku-buku hukum, jurnal-jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan tentang hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

c. Bahan Nonhukum

Bahan nonhukum atau bahan tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum. Bahan nonhukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis dan menjadi penting karena mendukung dalam proses analisa hukumnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan di perpustakaan dengan membaca, melihat data-data dan dokumen, serta melakukan penelusuran melalui media internet yang memiliki hubungan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis secara preskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Kemudian analisis bahan hukum menggunakan pendekatan dalam penelitian normatif, yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif

(*comparative approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini berdasarkan buku Pedoman Penulisan Hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan suatu pendahuluan dengan uraian yang mengungkapkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan deskripsi atau uraian tentang teori-teori, doktrin atau pendapat sarjana terkait permasalahan penelitian yang meliputi: *pertama* tentang demokrasi, dimana di dalamnya membahas tentang pengertian demokrasi dan demokrasi perwakilan. *Kedua* tentang parlemen, dimana di dalamnya dipaparkan tinjauan umum tentang parlemen, sifat-sifat perwakilan dalam parlemen, macam-macam sistem parlemen, dan keanggotaan parlemen. *Ketiga* tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dimana di dalamnya membahas sejarah kelahiran DPD dan keanggotaan DPD. *Keempat* tentang partai politik, dimana di dalamnya diuraikan pengertian partai politik, peran dan fungsi partai politik, dan partai politik dalam perwakilan. *Kelima*

tentang konsep independensi DPD, dimana di dalamnya akan memuat pengertian independensi dan konsep independensi DPD.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas terkait hasil penelitian berisi uraian dan analisa rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, yaitu bagaimana pengaturan tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas keanggotaan dalam Partai Politik dan bagaimana idealnya keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah atas keanggotaan dalam partai politik sebagai upaya menjaga independensi DPD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai intisari dari penelitian dan saran yang dihasilkan oleh penulis.